

Upaya Kepala Sekolah Mengintegrasikan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren Kedalam Kurikulum Sekolah

Ahmad Budiyono

Prodi Pendidikan Agama Islam, STIT Al-Urwatul Wutsqo – Jombang

e-mail: onobudi@stituwjombang.ac.id

Abstract: Schools with pesantren basis now is for integrating public education with pesantren. This study examines the pesantren-based PAI curriculum model integrates the curriculum into a national standard PAI curriculum. This is a head master effort as a leader who conducts two curriculums that is national and pesantren curriculum. The aim is in order to create a strong and superior generation in the fields of IMTAQ, science and technology development, and morality. PAI collaborated with pesantren subjects, is in accordance with national and pesantren curriculum. Pesantren curriculum is including *Nahwu Shorof*, Arabic, *SKI* and *Kedaruluman*, *Aqidah-Akhlak*, *Fiqh*, *Qur'an Hadith*, *Tajwid*. All of these are combined with descriptions of the books in the pesantren. Besides religious application programs including Reading Al-qu'an, such practices activities as *tahlil*, *istighosah* and *dhuha*. From the research results, the researcher recommends the Religion and national education ministry to provide training for teachers about the model integrated learning, especially for the institutions under the pesantren, then the school principals have to strive to integrate the pesantren curriculum into formal schools.

Keywords: Integration, Curriculum, Education

Pendahuluan

Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia pada aspeknya masing-masing, pada era globalisasi ini, setidaknya terdapat dua hal yang menjadi pekerjaan rumah, terutama oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan IPTEK. Sehingga hal itu menyebabkan pergeseran nilai-nilai agama, budaya, maupun kemanusiaan yang

semakin terkikis seiring dengan perkembangan zaman.¹ Untuk mewujudkan masalah di atas perlu mengadakan perbaikan diberbagai sektor sekolah diantaranya: modernisasi pengelolaan sekolah, modernisasi tenaga pengajar, dan penambahan dana untuk pendidikan tingkat sekolah.²

Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas sekolah nampaknya faktor guru perlu mendapat perhatian yang pertama dan utama, di samping kurikulumnya, karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut. Pemikiran hanya dalam reformasi sekolah dalam konteks implementasi kurikulum berbasis kompetensi, di sini guru diberi kebebasan yang lebih leluasa untuk mengembangkan kurikulum sesuai standar kompetensi, dan potensi peserta didik. Dengan kata lain, berhasil tidaknya sekolah dalam konteks pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sangat bergantung pada unjuk kerja gurunya.³

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum dan pembelajaran adalah kegiatan inti sekolah dan pengelolaanya merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen sekolah.⁴ Manajemen kurikulum dan kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat.⁵ Oleh karena itu pada level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan pembelajaran, disamping itu sekolah juga memiliki kewenang untuk mengembangkan

¹ Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif; Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) 255.

² Mulyasa, *KBK Konsep, Karakteristik dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 148.

³ E. Mulyasa, *Seminar Regional Desain Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, (Malang: IKIP Malang, 2004), 147.

⁴ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 1.

⁵ Nurdin Marty, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Diva Prees 2008), 85.

kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, karakter peserta didik, potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Kurikulum tidak hanya sebatas hal-hal yang tampak sebagaimana yang disampaikan oleh pakar kurikulum sebelumnya. Ada hal lain yang disebut kurikulum tersembunyi yang memberikan peran signifikan bagi proses pendidikan peserta didik. Dengan kata lain, unsur-unsur tersebut mencakup lingkungan, kultur, kebijakan sekolah, dan lainnya. Hal-hal demikian diakui mampu tidak, memberikan sumbangsih bagi perubahan pendidikan anak didik selama proses belajar. Hal demikian tidak mungkin akan melebihi perannya ketimbang unsur-unsur yang nampak.⁶

Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, dan maupun Pemerintah, maka pendidikan harus selalu ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini.⁷ Berangkat dari kerangka ini, maka upaya pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang, sebab pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat. Oleh karena itu, sejatinya pendidikan harus didesain mengikuti perubahan tersebut, kalau tidak maka pendidikan akan ketinggalan zaman.

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia saat ini telah mengakibatkan bangsa ini berada di titik nadir kehancuran. Krisis di bidang ekonomi, hukum, politik sampai pada krisis moral merupakan penyakit akut yang sulit disembuhkan, berkaitan dengan masalah moral, terjadi fenomena paradoks yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, namun tidak berperilaku muslim. Ini bisa dilihat siapa yang melakukan tindak kejahatan, korupsi, sodomi, konspirasi hukum, dan lain sebagainya mereka adalah orang Islam yang beragama Islam di -KTP-nya.

⁶ Moh. Yasim, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Prees, 2012), 27.

⁷ Sujanto dan Djihad Hasyim, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicpta Karya Nusa, 2000), 17.

Menghadapi fenomena tersebut, dunia pendidikan menjadi institusi yang paling bertanggung jawab. Karena hal tersebut disinyalir sebagai kegagalan dunia pendidikan dalam membentuk pribadi yang berkualitas dan mempunyai kekuatan intelektual, emosional dan spiritual. Sistem pendidikan nasional Pasal 31 ayat 2 UUD 1945, yang sekarang berlaku adalah UU N0.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam pasal 1 ayat 1 ditegaskan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pasal 3, menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mencapai dan memiliki kompetensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan melakukan tindakan *preventif* dan *kuratif* untuk meminimalisir masalah-masalah seperti apa yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan adanya formulasi tentang sistem pendidikan yang komprehensif, integratif, seimbang, dan terpadu, atas dasar prinsip kesatuan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jasmaniyah dan rohaniyah.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan berpengalaman menghadapi tantangan zaman dan mampu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya. Perlu dilirik lagi sebagai pendidikan alternatif dan solutif dengan salah satu terobosannya mendirikan madrasah sebagai wahana memadukan antara kepentingan dunia dan akhirat, IPTEK dan IMTAQ secara bersama-sama. Sehingga melahirkan manusia yang Multi Kompetensi dan Multi Talenta. Pada awalnya, pondok pesantren memang identik dengan ilmu

keagamaan belaka, karena memang hanya membuka pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah dan kajian kitab kuning. Tetapi, seiring perkembangan waktu serta tuntutan keadaan untuk melakukan moderasi pelajaran, akhirnya saat ini banyak pondok pesantren yang juga membuka sekolah mulai tingkatan terendah yaitu Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sampai pada sekolah tinggi.

Perubahan tersebut tidak bisa dipisahkan dari tuntutan zaman. Respon Pondok pesantren yang awalnya merasa kaku atau bahkan menutup diri akan kemajuan sains dan teknologi patut diacungi jempol kebanggaan. Pondok Pesantren telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Setelah Pondok Pesantren membuka pendidikan formal, banyak permasalahan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah permasalahan kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam Pondok Pesantren dengan Sekolah formal yang didirikan. Disatu sisi, Pondok Pesantren harus mencetak santri-santrinya menjadi manusia yang ahli dalam bidang agama tetapi disisi lain, sekolah menuntut agar siswanya menjadi orang yang melek sains dan teknologi.

Dari permasalahan tersebut, kemudian muncul alternatif solusi agar keduanya (Pendidikan Pondok Pesantren dan Sekolah Formal) saling mengisi dan bersama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk mencetak santri-santrinya menjadi manusia mempunyai keimanan, ketakwaan dan mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tujuan undang-undang Negara Indonesia. Maka disusunlah kurikulum Pesantren dan Sekolah formal itu dalam bentuk integrasi. Hanya integrasi kurikulum itulah yang bisa menyambungkan kedua pendidikan (Pesantren dan Pendidikan formal).

Pembahasan

A. Pengertian dan Komponen Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum, dalam pemahaman klasik, dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. Abdul Rahman Shaleh mengatakan,

kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kemampuan dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu sendiri merupakan muara dari keseluruhan proses penyelenggaraan kurikulum.⁸

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pendidikan.⁹ Secara Etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curic* yang artinya tempat berlari dan *curere* yang berarti tempat berpacu.¹⁰ Menurut Hamdani Hamid, penggunaan istilah kurikulum telah ada sekitar tahun 1820. Bahkan sebelumnya digunakan di Skotlandia awal abad ke 17. Kurikulum pada waktu itu merupakan mata pelajaran yang harus diambil dalam pendidikan dan pelatihan. Kurikulum sama dengan isi buku teks.¹¹

Menurut Sulistiyorini, makna semantik kurikulum dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, kurikulum merupakan mata pelajaran yang diajarkan disekolah atau bidang studi. *Kedua*, kurikulum merupakan muatan pengalaman aktual yang dimiliki siswa di bawah pengaruh sekolah sementara bidang studi adalah bagian kecil dari program kurikulum secara keseluruhan. *Ketiga*, Kurikulum merupakan strategi yang digunakan untuk mengadaptasi perwarisan kultural dalam mencapai tujuan sekolah.¹²

⁸ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 191.

⁹ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 37.

¹⁰ Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 35.

¹¹ Hamdani Hamid, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

¹² Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, 39.

Dari beberapa pendapat tentang kurikulum diatas, dapat diartikan bahwa kurikulum merupakan sebuah strategi atau rencana yang di rumuskan oleh lembaga pendidikan yang memberikan pengalaman dalam pembelajaran bagi peserta didik yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, sehingga kurikulum dari tahun ke tahun mengalami perubahan dari kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) pada tahun 2004, menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pada tahun 2006, dan berubah lagi menjadi Kurikulum 2013 pada tahun 2013.

2. Tujuan Kurikulum

Di lihat dari hirarkisnya tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat di ukur.

Tujuan kurikulum dibagi menjadi empat yaitu:¹³

a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis.TPN merupakan sasaran akhir yang harus di jadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan artinya setiap lembaga dan penyelenggaraan itu,baik pendidikan yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.¹⁴

b. Tujuan Institusional (TI)

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus di capai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus di miliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum

¹³ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Krikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009) 106.

¹⁴ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori*, 107.

yang di rumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan.¹⁵

c. Tujuan Kurikuler (TK)

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus di capai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat di definisikan sebagai kualifikasi yang harus di miliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan di arahkan untuk mencapai tujuan konstisional.¹⁶

d. Tujuan Pembelajaran atau Instruksional (TP)

Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang di harapkan dapat di miliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses merupakan syarat mutlak bagi guru.¹⁷

3. Dasar-Dasar dan Prinsip Kurikulum

Menurut Al syibani sebagaimana dikutip oleh Nova Ardy Wiyuni barnawi bahwa kerangka dasar tentang dasar kurikulum yang Islami. Adalah sebagai berikut.

- 1) Dasar agama, dasar agama menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum, dasar agama dalam kurikulum didasarkan pada al Qur'an, hadits, dan hukum alam.
- 2) Dasar falsafah, dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung syarat kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran.

¹⁵ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori*, 120.

¹⁶ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori*, 135 – 160.

¹⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori*, 176.

- 3) Dasar psikologi, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai tahap kematangan dan bakatnya serta memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perorangan antara satu peserta dengan peserta yang lain.
- 4) Dasar sosial, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan Kebudayaannya baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berfikir, adat kebiasaan, dan sebagainya.¹⁸

Adapun tentang prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam, diantaranya:

- 1) Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan.
- 2) Prinsip efektifitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektifitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar.
- 3) Prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai dan dapat memenuhi harapan.
- 4) Prinsip kesinambungan adalah saling hubungan dan jalin menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan.
- 5) Prinsip fleksibilitas artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak yang meliputi fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, mengembangkan program pengajaran, serta tahap-tahap pengembangan kurikulum.

¹⁸ Nova Ardy Wiyani dan Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 170.

- 6) Prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan masyarakat.¹⁹

4. Macam-Macam Kurikulum

- a. *Sparated subject curriculum* (kurikulum mata pelajaran atau menyatu). Kurikulum ini dengan tegas memisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kurikulum ini dikatakan demikian karena data-data pelajaran disampaikan pada peserta didik dalam bentuk subyek atau mata pelajaran terpisah dengan yang lainnya. Contoh; mata pelajaran teori listrik tidak ada sangkut pautnya dengan pengetahuan perkakas lainnya.
- b. *Correlated curriculum* (kurikulum korelasi atau pelajaran saling berhubungan). Mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga memperkuat satu dengan yang lainnya.
- c. *Integrated curriculum* (kurikulum terpadu). Beberapa mata pelajaran dijadikan satu atau di padukan. Dengan meniadakan batas-batas mata pelajaran yang disajikan berupa unit atau keseluruhan. Unit merupakan satu kesatuan yang bulat dari pada bagian-bagian yang terpisahkan satu sama lainnya, merupakan satu rangkaian dari pada bagian yang bersatu padu dengan serasi.²⁰

B. Integrasi Kurikulum

1. Pengertian Integrasi Kurikulum

Menurut Saiful Bahri Jamaroh, strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.²¹ Sedangkan menurut muhibin syah, strategi adalah salah satu siasat atau rencana. Dalam bahasa inggris kata strategi yang dianggap relevan adalah

¹⁹ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983), 116-118.

²⁰ Khaeruddin, dkk, *kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasi di Madrasah*, (Semarang: MDC, 2007), 38.

²¹ Saiful Bahri, *Strategi Belajar Membaca menghafal*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 1996), 5.

approach (pendekatan) dan kata *procedure* (tahapan kegiatan), jadi strategi merupakan sejumlah langkah-langkah atau tindakan yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran tertentu.²²

Penerapan kurikulum *integratif* yang bersifat *adaptif*, *inklusif*, dan *scientific* dalam lembaga pendidikan Islam, baik disekolah maupun pesantren di asumsikan akan mampu memberikan sesuatu yang berguna dan dapat memunahi maksud yang dikehendaki. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unik atau keseluruhan. Dengan pelajaran yang menyajikan fakta yang tidak terlepas satu sama lain diharapkan mampu membentuk kepribadian peserta didik yang integral, selaras dengan kehidupan sekitar.²³

Diantara bentuk kurikulum terintegrasi yang sedang di sosialisasikan Departemen Pendidikan Nasional sebagai implemtasi Manajemen Berbasis Sosial (MBS) adalah apa yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kemudian dilanjut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kurikulum ini merupakan perpaduan penugasan pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap mereflesikan dalam kebiasaan berfikir dengan bertindak.²⁴

Kurikulum terpadu (*Integrated Curriculum*) merupakan suatu produk dari usaha mengintegrasikan bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusi dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Kurikulum model ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar. Kurikulum terpadu sangat mengutamakan agar anak didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses

²² Muhibbin Syam, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Logos, 1995), 215.

²³ Ainurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah berbasis Pesantren*, (Jakarta: Listafarika Putra, 2005), 59.

²⁴ Ainurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah berbasis Pesantren*, 61.

pembelajaran, sebagai contoh: dengan belajar menggunakan radio anak didik sekaligus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan listrik, siaran dan sebagainya.²⁵

Kurikulum terpadu dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, *pertama; The Child Centered Curriculum*, yakni dalam merencanakan kurikulum faktor anak menjadi perhatian utama, *kedua; The social function curriculum*, kurikulum ini menjadi fungsi-fungsi utama kehidupan sosial sebagai dasar pengorganisasian pengalaman belajar. *Ketiga; The Experience curriculum*, maksudnya dalam perencanaan kurikulum kebutuhan anak merupakan perhatian utama.²⁶

2. Pola Integrasi Kurikulum

Beberapa pola pelaksanaan integrasi kurikulum yang telah dirumuskan pada sekolah dapat diaplikasikan dengan pola berikut:

- a. Pola Sistem Sekolah Negeri. Kurikulum ini terintegrasi dengan bercorak inklusif, humanis, *scientific* diimplementasikan dengan mengikuti pola sekolah umum (non agama) yang berlaku pada model madrasah.
- b. Pola program kecakapan hidup (*life skill*) atau setara dengan model sekolah kejuruan. Pola ini memfasilitasi santri yang mempunyai minat dan kemampuan dalam bidang tertentu untuk mengikuti program studi ketrampilan.
- c. Pola program penyusunan dan bimbingan. Dengan program ini siswa-siswi sekolah bergiliran di didik bersama-sama dengan komunikasi industri atau membaaur dengan komunikasi masyarakat perajin yang relevan dengan kebutuhan di masa mendatang.
- d. Pola sekolah umum dan pesantren. Pendidikan agama diberikan sebagai non-kurikuler atau bahkan dimasukkan sebagai kurikulum sekolah sebagai muatan lokal. Program ini sepenuhnya mengintegrasikan sekolah umum

²⁵ S. Nasution, *Kurikulum dan pengajaran*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 111.

²⁶ Hendyat Soetopo & Waty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 80.

dengan sistem pendidikan pesantren yang bercorak tradisional. Dengan modal seperti ini diharapkan para siswa atau santri mampu menguasai ilmu umum dan agama bercorak pesantren, sebagai bekal mereka setelah menyelesaikan sekolah umum kejenjang yang lebih tinggi. Bagi yang ingin lebih memperdalam masalah agama maka disediakan tempat (asrama pesantren) dan pengajaran sebagai spesialisasi keagamaan dalam jangka waktu tertentu sambil menempuh pendidikan yang lebih tinggi.²⁷

3. Strategi Integrasi Kurikulum

Sebelum menyusun kurikulum dan pengembangannya, sebuah lembaga pendidikan harus di lihat dengan jeli, memahami kondisi dan dinamika pendidikan saat ini yang mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut dapat dilihat dari persoalan yang berkaitan dengan masalah kuantitas, kualitas dan relevansi eksternal, elitisme dan manajemen, misalnya rendahnya mutu pendidikan, menurunnya moralitas peserta didik belum meratanya kesempatan belajar terutama bagi masyarakat dipedalaman, pelosok dan daerah yang rawan konflik, tidak jelasnya sistem pendidikan yang ada, dualisme kebijakan kelembagaan, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, manajemen pendidikan yang melangit (beberapa dimenara gading) sehingga tidak mengakar (*grass root*) sumber daya pendidik yang kurang profesional dan sebagainya.

Setelah mengetahui beberapa persoalan diatas, maka baru dirancang strategi pengembangan kurikulum yang dilakukan beberapa tahapan-tahapan, sebagai berikut:²⁸

- a. Tahapan pengembangan ditingkat lembaga yakni; pengembangan secara keseluruhan dan program kegiatan yang tertuang didalam kurikulum pendidikan tersebut seperti *Pertama*. Perumusan tujuan institusional yang berisis tentang tujuan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. *Kedua*

²⁷ Muhibbin Syam, *Psikologi pendidikan*, 66.

²⁸ Ainurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah berbasis Pesantren*, 65.

- penerapan isi dan struktur program. *Ketiga*, penyusunan strategi dan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan.
- b. Pengembangan program tiap bidang studi. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mencatat tujuan kurikulum, yakni tujuan bidang studi yang akan dicapai selama program itu diajarkan. Tahap ini meliputi tiga kegiatan yaitu; *Pertama*, penerapan pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasa di dasarkan pada sekolah dan pesantren. *Kedua*, penyusunan garis-garis besar program pengajaran yang disusun teratur setelah merumuskan tujuan kurikulum dan institusional. *Ketiga*, menyusun pedoman khusus pelaksanaan program khusus bidang studi.
 - c. Pengembangan program pengajaran kelas, tahapan ini adalah tahapan kewenangan guru untuk mengembangkan program pengajaran kelas. Guru harus mempunyai satuan pelajaran (SP), untuk mengembangkan kegiatan dikelas.

Strategi pengintegrasian kurikulum²⁹ sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, sebagaimana berikut:

- a. Karakter kurikulum integral, yang mencakup lingkup ide baru kurikulum integral dan kejelasannya bagi pengguna dilapangan.
- b. Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum dan kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum integral dilapangan.

²⁹ Kurikulum integral merupakan perpaduan penugasan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direflesikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak ini sesuai dengan ranah kompetensi dalam berfikir Gordon sebagaimana dikutip oleh Dawan dan Ta'arif yang meliputi *knowledge* (Pengetahuan), *Undertanding* (Kedalam kognitif dan afekti yang dimiliki oleh individu), *Skill* (sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya), *Volue* (suatu standar prilaku yang telah diyakini dan secara psikologi telah menyatu pada diri), *Interest* (Kejenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan).

- c. Karakter pengguna kurikulum integral, yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap pendidik terhadap kurikulum integral serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum integral dalam pembelajaran.³⁰

C. Integrasi Kurikulum Sekolah dengan Kurikulum Pesantren

Terjadi penguatan yang sangat intens antara pesantren dengan sekolah-sekolah umum yang berkembang pada masa pemerintahan colonial Belanda. Disatu pihak diterapkann sistem pendidikan hanya untuk kalangan bangsawan dengan sistem sekolah modern, dilain pihak masyarakat menganggap penerapan sekolah tersebut mengancam eksistensi dan keberlangsungan proses pembelajaran sistem pesantren yang merupakan khazanah tradisi budaya Indonesia yang mengakar berabad-abad. Sehingga usaha untuk menggabungkan (mengintegrasikan) sistem pesantren dan sekolah umum (modern) oleh pemerintah Belada cukup sulit direalisasikan.³¹

Sampai saat ini, tampak pesantren masih dalam posisi dilematis. Didalam satu sisi pesantren ingin kosisten sebagai lembaga tafaquh fi al-dinnya. Dilai sisi pesantren dituntut untuk eksis mengikuti perkembangan zama.³²

A. Malik Fadjar menyebutkan sebagai disoriansi. Lebih lanjut menurutnya ada tiga kelemahan pesanten yaitu kepemimpinan yang stralistik dan hirarkis yang berpusat pada figur seseorang kyai, kelemahan bidang metodologi dan tejadinya disoriansi.³³

Amin haedari dkk menyebutkan sebagai ambicalensi orientasi. Menurutnya ada dua penyebab kompleksitas persoalan dalam pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal adalah ambivalensi orientasi dan pemahaman parsial atau dikotomis yang memisahkan atara ilmu agama dan sains.³⁴

Gejala pesantren tradisional yang mulai banyak ditinggalkan dan beralih kepada pesantren yang menawarkan kombinasi tradisional dan moder, jelas

³⁰ Ainurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah berbasis Pesantren*, 61.

³¹ Ainurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah berbasis Pesantren*, 7-8.

³² A. Malik Fadjar, "Sistensa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren" dalam Quo Vadis Pendidikan Islam, ed. Mudjia Rahaharjo, (Malang: UIN Prees, 2006), xxii.

³³ A. Malik Fadjar, "Sistensa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren", xxiv.

³⁴ Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren*, (Jakarta: IRD Prees), 88.

menunjukkan beralihnya orientasi umat Islam. Mengikuti pembagian pola-pola pesantren. Haidar Putra Daulay membagi bebreapa pola pesantren, *Pertama*, Pesantren yang dicirikan; pengajian kitab kuning saja. *Kedua*, Memakai metode sorogan, wetonan, dan hafalan dalam proses belajar mengajar. *Ketiga*, tidak memakai sistem kelasik. *Keempat*, tujuan pendidikan adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajari sikap dan tingkah laku jujur dan bermoral serta menyiapkan para santri untuk hidup dan bersih hati.³⁵

Pada tahun 1905 sejumlah ulama sudah mulai terbuka untuk memperkenalkan sistem madrasah, yaitu dengan penerapan system klasik sesuai dengan sistem barat dan sebagian mereka bahkan memperkenalkan ilmu pengetahuan umum. Sejak dasawarsa 1970-an sejumlah pesantren telah membuka sekolah-sekolah umum (SD, SMP, dan SMU). Hal ini terjadi Karena adanya kesadaran dilingkungan pengasuh pesantren bahwa tidak semua alumni bisa menjadi ulama, ustadz atau da'I. yang banyak dari mereka justru menjadi masyarakat biasa yang tidak terlepas dari kebutuhan mencari pekerjaan yang tentu saja memerlukan pengetahuan dan ketrampilan tertentu.³⁶

Pada pesantren, santrinya tidak disediakan asrama (pemondokan) di komplek pesantren tersebut; mereka tinggal diseluruh pelosok desa sekiling pesantren (santri kalong) dimana cara dan metode pendidikan pengajaran agama Islam dengan sistem *wetonan* yaitu para santri pada waktu-waktu tertentu.³⁷

Meskipun telah terjadi perkembangan berbagai perkembangan pesantren yang bervariasi, namu secara umum pesantren tetap memiliki fungsi:

- a. Lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fī al-dīn*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic volues*)

³⁵ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam SIstem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), 27-30.

³⁶ Masyutukin Abdillah, *Kapital Selekt Pondok Pesantren, Status Pendidikan Pesantren dalam Sisdiknas*, (Jakarta: Depang RI, 2002), 56.

³⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Tranformasi metodologi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, Tt), 2.

- b. Lembaga keagamaan yang selalu melakukan control sosial (*social control*)
- c. Lembaga pendidikan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)

Tujuan institusional pesantren yang lebih luas dengan tetap mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan pesantren secara nasional pernah diputuskan dalam masyarkat/ lokakarya intensifikasi pesantren di Jakarta yang berlangsung pada 2 s.d 6 mei 1978. Tujuan umum pesantren adalah membina warga Negara agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran Agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi Agama, Masyarakat dan Negara.³⁸

Adapun tujuan khusus pesantren adalah:

- a. Mendidik siswa/ santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan kesehatan batin sebagai warga Negara yang berpancasila;
- b. Mendidik siswa/santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubalig yang ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis;
- c. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan bangsa dan Negara;
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan Makro (pendesaan, masyarakat, dan lingkungannya);
- e. Mendidik siswa dan santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangu mental spiritual;
- f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat atau lingkungan dalam usaha pembangunan masyarakat dan bangsa;³⁹

³⁸ Adurrahman Wahid. *Bunga Rampai Pesantren*, (ttp: Dharma Bakti, tt) 147-148,

³⁹ Marzuki Wahid, *Pesantren dalam Pembangunan: Mencari Kinerja dan Pemberdayaan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 147.

Dalam operasionalnya pesantren memiliki nilai-nilai oleh lembaga-lembaga lain. *Pertama*, cara pandang kehidupan secara keseluruhan adalah sebagai ibadah, *lillāhi ta'ālā*. *Kedua*, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang tiada batas (*loog life education*), ilmu ibadah tak bermakna jika diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, keikhlasan berkerja untuk tujuan-tujuan bersama. Semua itu dapat terjalin dengan *intens* sehingga terjadi interaksi sosial yang cukup tinggi.⁴⁰

1. Kurikulum Pesantren dan Karakteristiknya

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan non formal tertua di Indonesia. Sumbangsih pesantren terhadap dunia pendidikan sudah tak terhitung jumlahnya. Mulai dari pembinaan moral spiritual sampai masalah kecakapan hidup telah dipelajari dipesantren. Namun masih banyak sekali kalangan yang tidak memperhatikan dan memandang sebelah mata terhadap pendidikan pesantren. Mereka berangapan bahwa pesantren selama ini selalu identik dengan sebagai pendidikan anti perubahan, eksklusif, konservatif (tradisional) atau tidak demokratis.

Kurikulum yang ada di pondok pesantren menurut Abddurahman Wahid memperlihatkan pola yang tetap. pola tersebut antara lain:

- a. Kirukulum pesantren bertujuan untuk mencetak ulama dikemudian hari;
- b. struktur dasar kurikulum pesantren adalah pengajaran pengetahuan agama dalam sengenap tingkatan dan pembicaraan pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai/gurunya;
- c. secara keseluruhan kurikulum pesantren berifat fleksibel, dalam pengertian setiap santri berkesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sepenuhnya

⁴⁰ Lukman Hakim, *Kapital Selektu Pondok Pesantren, Tradisi Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Depag RI, 2002), 41.

atau sebagian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Bahkan pada pesantren yang telah mempunyai sistem pendidikan sekolah sekalipun.⁴¹

Kurikulum pondok pesantren tidak seperti yang difahami dalam kurikulum pada lembaga pendidikan formal, yang mencakup seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar dan hasil belajar serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan.⁴²

Kurikulum pondok pesantren merupakan urutan kitab yang dipelajari oleh santri, dimana kurikulum pesantren tidak distandarisasi secara kolektif. Terkadang suatu kita yang diajarkan untuk tingkat *Ibtidā'iyah* (dasar) disuatu pesantren, sedangkan pesantren lain mengajarkan di tingkat *tsanā'wiyah* (menengah). Namun demikian diantara pesantren mempunyai banyak kesamaan, antara lain dalam bidang hal-hal pengajian ilmu-ilmu tertentu seperti bidang *Aqīdah, Fiqh, usūl al-fiqh, tafsīr/ilm al-tafsīr, hadīth/ ilm al-hadīth, akhlāq, tasawwūf, tajwīd, nahwu, sarf dan balāghah*. Kepada santri pemula, biasanya diajarkan pesantren mengenalkan pelajaran aqidah dan fiqih yang paling sederhana, seperti rukun iman, rukun Islam dan cara bersuci. Untuk menentukan urutan urutan kitab pembelajarannya di dahulukan pesantren mendasarkan pada kitab yang pembahasannya sederhana, seperti *safīnah al-najāh* dan *Sullām al-Taḥfīq* bagi santri pemula. Setelah itu baru dilanjutkan pada kitab yang pembahasannya lebih luas dan terurai.⁴³

Kurikulum pondok pesantren lebih banyak ditentukan oleh otoritas seorang kiai yang memangkunya, sehingga sering ditemukan kesamaan kurikulum atau kitab-kitab yang dijadikan standar dalam pengajarannya, bahkan disebagian pondok pesantren ada yang tidak ditemukan kurikulumnya.

⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Kurikulum Pesantren dan Pendidikan Lapangan Kerja, Dalam Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Darma Bakti, tt) 135.

⁴² E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2006), 46.

⁴³ Ahmad zahro. *Tradisi Intelektual NU* (yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004) 32-33.

Walaupun perakteknya bimbingan rohani dan latihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kesatuan dalam proses pendidikan.⁴⁴ Adanya perbedaan kurikulum dikalangan pondok pesantren menunjukkan bahwa perhatian kalangan pondok pesantren terhadap kurikulum masih kurang.

Adapun kitab-kitab yang berkembang di pondok pesantren, khususnya dalam bidang fiqih dan ilmu bahasa arab, adalah sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 2.2
Bidang Ilmu Sarf

No	Nama Kitab	Pengarang
1	Al-Binā' wa al-asās	Mulla al-Danqāri
2	Al-Tasrīr li al-Izzi	Izza al-Dīn Ibrahīm al Zanjāni
3	Al-Maqsūd fi al-Sarf	Tidak dikenal
4	Al-amthilah al-Tasrīfiyyah	Muhammad Ma'sūm bin Ali
5	Hall al-Maqāl nin al-Nazm al-Maqsūd	Muhammad Ullays
6	Kaylāni	Ali bi Hisham al-Kaylani

Tabel: 2.3
Bidang Ilmu Nahwu

No	Nama Kitab	Pengarang
1	Al-‘Awāmil al-Mi‘ah	Abd al-Qāhir bin Abd bin al-Rahmān al-Jurjāni
2	Al-Muqaddimah al-Jurūmiyah	Abū abd Allāh bin Dāwūd al-sanhaji al-jurūmiyyah
3	Durroh al-Bāhī/'Imriti al-mutammimah	Sharf bin yahyā al-ansāri al 'imritī Shams al-Dīn Muhammad bin

⁴⁴ M. Habib chirzin. *Agama, Ilmu dan Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1988), 88.

⁴⁵ Abdurrahman, Dkk. *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 240-244

No	Nama Kitab	Pengarang
4	Alfiyyahibn Mālik dan Sharh Ibn Aqil	Muhammad al-ru'yāni al-hattābi Abdullāh bin Abd al-Rahmān al Aqīl
5	Qawā'id al-I'rab	Ibn Hishām
6	Qawā'id al-lughah al-'arabiyyah Al-nahw al-wadīh fi Qawā'id al-	Hafni Bak Nasīr
7	lughah al 'arabiyah	

2. Evaluasi Kurikulum

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu dan saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah dan harus jelas dan target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada hasil (*output*) yang ingin di capai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *school base quality improvement* bukan hanya proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang mencakup aspek kemampuan akademik atau “kognitif” dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya NEM oleh OKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah, baik yang sudah ada patokanya atau yang lainnya dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan memanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.⁴⁶

⁴⁶ Jarome, S Arcaro, Quality in Education: An Implementasion Handbook (ttp: St. Lucies, 1995), 79.

D. Upaya Kepala Sekolah Mengintegrasikan Kurikulum

Peran kepala sekolah dalam mengintegrasikan kurikulum berbasis pesantren dalam kurikulum sekolah antara lain adalah penyamaan pemahaman tentang visi dan misi lembaga, kemudian peran yang paling penting adalah kepala sekolah menjalankan fungsi manajemen pendidikan yaitu *planing* (perencanaan), *organizing* (organisasi) *motivating* (penggerakan) dan *controlling* (pengawasan).

Perencanaan yang dilakukan kepala dalam menyusun kurikulum, dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik yayasan, waka kurikulum, guru, murid dan juga masyarakat). Hal ini sejalan dengan Ngalim Purwanto yang menyatakan bahwa Sebagai perencana (planner). Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tatapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan.⁴⁷

Organizing (organisasi), kepala membuat beberapa struktur yang berbeda dengan lembaga lain yaitu dibagi menjadi dua, yaitu waka kurikulum agama (kemudian disebut dengan waka diniyah) dan waka kurikulum yang mata pelajaran umum. Kemudian ada lagi dalam bidang agama yaitu waka akhlak. Tentu semua waka yang ada mempunyai bidang tanggung jawab yang berbeda, oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dari kepala, lebih bisa terkontrol karena pembagian waka yang sangat rinci, yang berbeda dengan lembaga lain. Hal ini sejalan juga dengan Menurut Purwanto, bahwa seorang kepala sekolah mempunyai sepuluh macam peranan, yaitu: “Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah.”⁴⁸

⁴⁷ Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

⁴⁸ Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

Hal tersebut juga sejalan dengan Dirawat, bahwa kepala adalah pengelola kepegawaian. Termasuk dalam bidang ini yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan kenaikan pangkat, cuti, perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, penciptaan hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, masalah penerapan kode etik jabatan.⁴⁹

Dalam hal *motivating* (penggerakan) kepala selalu memotivasi untuk pengintegrasian, dengan sering menyampaikan visi dan misi lembaga. Hal ini sejalan dengan E. Mulyasa bahwa Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).⁵⁰

Dan *controlling* (pengawasan) kepala melakukan supervisi dan sering pengecekan kegiatan guru ketika didalam kelas. Hal ini sejalan dengan Dirawat yaitu Supervisi pada dasarnya pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakap/terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Supervisi adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membantu guru-guru agar semakin mampu mewujudkan proses belajar mengajar. Di mana Kepala Sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan

⁴⁹ Dirawat, dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 80.

⁵⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 98-122.

kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas ini antara lain :

1. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan.
2. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid.
3. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan bakat masing-masing dan selanjutnya mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat, bakat dan kemampuannya.
4. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai.⁵¹

Kesimpulan

Upaya kepala sekolah dalam mengintegrasikan kurikulum berbasis pesantren dalam kurikulum sekolah yaitu melalui penyamaan pemahaman tentang visi dan misi lembaga, kemudian peran yang paling penting adalah kepala sekolah menjalankan fungsi manajemen pendidikan yaitu *planing* (perencanaan), *organizing* (organisasi) *motivating* (penggerakan) dan *controlling* (pengawasan). Dan mengkolaborasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan model berbasis pesantren dengan tidak meninggalkan esensi dari kurikulum nasional itu sendiri. Seperti Mata Pelajaran Bahasa Arab, Sejarah kebudayaan Islam, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an hadist yang kesemuanya dipadukan dengan keterangan kitab yang ada di pesantren.

⁵¹ Dirawat, dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 80.

Daftar Rujukan

- Abdillah, Masytukin. *Kapital Selekt Pondok Pesantren, Status Pendidikan Pesantren dalam Sisdiknas*, Jakarta: Depang RI, 2002
- Abdurrahman, Dkk. *Pesantren Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Arifin, Zainal. *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Diva Press, 2012
- Bahri, Saiful. *Strategi Belajar Membaca menghafal*, Jakarta PT. Rleneka Cipta, 1996
- Barizi, Ahmad. *Pendidikan Integratif; Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Malang; UIN-Maliki Press, 2011
- Chirzin, M. Habib. *Agama, Ilmu dan Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006
- Dawam, Ainurrofiq. *Manajemen Madrasah berbasis Pesantren*, Jakarta: Listafarika Putra, 2005
- Fadjar, A. Malik. “Sistensa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren” dalam Quo Vadis Pendidikan Islam, ed. Mudjia Rahaharjo, Malang: UIN Prees, 2006
- Haedari, Amin. *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Prees
- Hakim, Lukman. *Kapital Selekt Pondok Pesantren, Tradisi Pendidikan Pesantren*, Jakarta: Depag RI, 2002
- Hamid, Hamdani. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hendyat Soetopo & Waty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Khaeruddin, dkk. *kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasi di Madrasah*, Semarang: MDC, 2007

- Lazaruth, Soewadji. *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Marty, Nurdin. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Diva Prees 2008
- Mulyasa, E. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2006
- _____. *Seminar Regional Desain Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, Malang: IKIP Malang, 2004
- _____. *KBK Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- _____. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Nasution, S. *Kurikulum dan pengajaran*, Jakarta: Bina Aksara, 1993
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983
- Purwanto, Ngalm. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Tranformasi metodologi Institusi*, Jakarta: Erlangga, Tt
- Rusman. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Krikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009
- Shaleh, Abdul Rachman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: Rajwali Press, 2004
- Sujanto dan Djihad Hasyim, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000

- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Syam, Muhibbin. *Psikologi pendidikan*, Bandung: Logos, 1995
- Wahid, Abdurrahman. *Kurikulum Pesantren dan Pendidikan Lapangan Kerja, Dalam Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Darma Bakti, tt
- _____. *Bunga Rampai Pesantren*, ttp: Dharma Bakti, tt
- Wahid, Marzuki. *Pesantren dalam Pembangunan: Mencari Kinerja dan Pemberdayaan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Wiyani, Nova Ardy dan Barnawi. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012
- Yasim, Moh. *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Prees, 2012
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*, yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004